PENERAPAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK (Studi Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST)

Berthon Jonathan, Widodo Tresno Novianto, Riska Andi Fitriono
Email: berthonjonathan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan pada kasus merek *memory card* merek "V-GEN" di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana pemalsuan merek dalam perkara nomor 1483/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Terdakwa dalam kasus ini telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 94 yaitu memperdagangkan barang yang diduga atau patut diduga merupakan hasil pelanggaran penggunaan merek secara keseluruhan dengan merek pihak lain untuk barang sejenis.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Merek

Abstract

This research method aims to understand its application the law enforcement in the case of conterfeiting memory card trademark "V-GEN" on the Central Jakarta First Intance Court. This study was a prescriptive doctrinal legal research. The approach taken is historical approach, statute approach and case approach. The law material source used primary and secondary law materials, while the technique of law material data used was deductive syllogism. Based on research results can be concluded Law enforcement of a cirminal act case number 1483 / Pid.Sus / 2013 / PN.JKT.PST has been in accordance with aRI's Act Number 15 of 2001 about Trademark. Namely the trading of goodsshould be suspected or suspected violations of the use of a sign of the results of the same brand as a whole with a brand owned by other parties to goods which are similar.

Keywords: Criminal Act, Conterfeiting Trademark

A. Pendahuluan

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum di dalamnya terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, seperti penegakan hukum. Hukum dalam wujudnya sebagai peraturan, jelas tidak dapat melakukan semuanya. Masuknya peranan para penegak hukum yang tidak lain adalah manusia-manusia hukum dalam wujudnya sebagai peraturan, jelas tidak dapat melakukan semuanya. Kehendak-kehendak hukum dilakukan melalui manusia-manusia. Manusia yang menjalankan penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan-tangan orang tersebut, Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, makan menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum. (Satjipto Rahardjo , 2009: 1).

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan perundang-undangan) hukum. Janji kehendak tersebut misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang memenuhi persyaratan tertentu dan

sebagainya (Satjipto Rahardjo, 2009: 7). Salah satu penegakan hukum adalah penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana di bidang merek.

Merek merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut KI) yang menembus segala batas. Dimana-mana ada usaha untuk memberikan perlindungan secara lebih besar. Terutama bagi negara-negara yang sudah maju, seperti Amerika Serikat yang menghendaki adanya perlindungan terhadap KI warga negaranya dari negara-negara lain, supaya arus teknologi penemuan hak cipta serta merek-merek mereka yang sudah terkenal di bidang perdagangan, yang telah mendapatkan *goodwill* secara seksama dengan pengorbanan banyak biaya dan tenaga dapat dilindungi secara wajar oleh negara-negara lain (Sudargo Gautama, 1997: 5-6).

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*). Merek (*trademark*) sebagai Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan/atau jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha. Lebih-lebih dengan perkembangan periklanan, baik nasional maupun internasional dewasa ini dan dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya (Rahmi Jened, 2015: 3-4).

Peraturan tentang merek pertama yang dibuat oleh pemerintah Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Berkaitan dengan kepentingan reformasi merek, Indonesia turut serta meratifikasi Perjanjian Internasional Merek WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Kemudian pada tahun 1997, dalam rangka menyesuaikan dengan perjanjian Internasional mengenai aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*)-GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*). Pembaharuan terakhir pengaturan merek dilakukan pada tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Asian Law Group Pty Ltd, 2005: 132).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UUM) menyebutkan bahwa merek harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk hak atas merek. Disebutkan, hak atas merek yaitu hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Adanya UUM tersebut perlindungan suatu barang dan/atau jasa yang telah memiliki merek tentunya diharapkan dapat menjamin keaslian serta kualitas dari barang dan/atau jasa tersebut. Konsumen akan tertarik untuk memiliki suatu barang dan/atau jasa tersebut apabila tertera merek yang menjadi identitas atau ciri khas.

Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang merek bahkan di dalamnya terdapat sanksi pidana bagi yang melakukan tindak pidana di bidang merek, barang dan jasa yang telah terdaftar tersebut dapat dipalsukan atau biasa disebut merek palsu. Barang dan/atau jasa dengan menggunakan merek palsu marak beredar di Indonesia. Barang dan/atau jasa tersebut menggunakan merek palsu atau bukan diproduksi oleh orang dan badan hukum yang berwenang atas merek tersebut. Pelaku memalsukan merek barang dan jasa karena selain sudah terkenal dan banyak konsumen yang menggunakan merek tersebut, hasil penjualan jugasangat menguntungkan pelaku.

Akibatnya pemilik merek yang sah atas merek terkenal dirugikan kepentingannya dengan berkurangnya pangsa pasar, pudarnya *goodwill* atau reputasi merek yang telah dibangun dengan susah payah dan biaya tidak sedikit. Tidak hanya kepentingan pemilik merek terkenal saja yang dirugikan, konsumen juga dirugikan karena membeli produk yang tidak sesuai dengan ekspektasinya sebagai timbal balik dari pembayaran yang sudah dilakukan (Titon Slamet Kurnia, 2011: 99).

Terdapat kasus pemalsuan merek yang akan penulis analisis untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana di bidang merek tersebut. Kasus pemalsuan *memory card* atau kartu memori bermerek V-GEN dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1483/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST. Kasus ini berawal dari adanya komplain yang diterima oleh Benny Pontian Muslim mengenai *memory card* merek V-GEN yang mudah rusak bahkan *memory card* tersebut hanya dapat menampung 10% dari kapasitas yang tersedia.

Benny Pontian Muslim selaku pemegang hak merek V-GEN yang resmi tersebut mendengar bahwa *memory card* yang bukan diproduksinya dijual di Toko Duta ACC (Duta *Spare Part*) kemudian menugaskan karyawan CV. INTER DIGITEL SOLUTION yaitu Joki Suyoto Halim dan Saksi Linca Harjono Gurning untuk membuktikan informasi yang didapat dengan cara membeli *memory card* merek V-GEN kapasitas 2 GB sebanyak 535 pes harga satuan Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) di Toko Duta ACC (Duta *Spare Part*) milik Terdakwa Edison. *Memory card* yang telah dibeli tersebut diserahkan kepada Benny Pontian Muslim lalu kemudian dibandingkan dengan *memory card* yang asli. Setelah diteliti ternyata benar *memory card* merek V-GEN yang diperjualbelikan oleh Terdakwa Edison tersebut diduga palsu dan sama pada pokoknya dengan *memory card* merek V-GEN milik CV. INTER DIGITEL SOLUTION yang telah memiliki Sertifikat Hak Merek terdaftar. Dijualnya *memory card* V-GEN yang diduga palsu tersebut merugikan CV. INTER DIGITEL SOLUTION baik moril maupun materil antara lain menurunnya omzet penjualan di pasaran dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap *memory card* merek V-GEN karena memiliki kualitas barang yang rendah. Kemudian Benny Pontian Muslim mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa Edison tersebut kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan merek tersebut melalui penulisan hukum (Jurnal) yang berjudul "Penerapan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Merek (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1483/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST)".

B. Metode Penelitian

Penelitian senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi. Jika jawabannya diketahui, maka tidak perlu lagi diadakan penelitian. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuwan sejawat dalam suatu bidang keahlian (intersubjektif). Dengan demikian, penemuan hasil penelitian tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschappelijkheid*) dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat sebagai hal baru (*nieuw moet zijn*). Sesungguhnya benar suatu ungkapan yang menyatakan bahwa kekuatan kajian hukum normatif terletak pada langkah-langkah sekuensial yang mudah ditelusuri oleh ilmuwan hukum lainnya (Johnny Ibrahim, 2006: 277-278).

Memulai suatu penelitian hukum diperlukan adanya penelusuran terhadap bahan hukum. Penelusuran hukum diperlukan sebagai dasar dalam pembuatan suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memberikan refleksi dan penelitian terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi (Johnny Ibrahim, 2006: 299). Tujuan penelitian hukum yakni memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan, bukan memberikan kebenaran hipotesis. Ilmu hukum merupakan ilmu terapan sehingga penelitian hukum harus melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 69).

C. Pembahasan

Hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum di dalamnya terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, seperti penegakan hukum. Hukum dalam wujudnya sebagai peraturan, jelas tidak dapat melakukan semuanya. Masuknya peranan para penegak hukum yang tidak lain adalah manusia-manusia. Kehendak-kehendak hukum dilakukan melalui manusia-manusia. Manusia yang menjalankan penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan-tangan orang tersebut, apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara

mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut. Kita tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan para penegak hukum, sebagai kategori manusia dan bukan sebagai jabatan, akan cenderung memberikan penafsiran sendiri terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tingkat dan jenis pendidikan, kepribadian dan masih banyak faktor pengaruh lainnya (Satjipto Rahardjo, 2009: 1-2).

Penegakan hukum akan diamati sebagai suatu proses tersendiri dalam masyarakat, yang bertujuan mempertahankan hukum dan ketertiban. Penegakan hukum tidak dilihat sebagai suatu proses yang tertutup, melainkan yang melibatkan lingkungannya. Istilah melibatkan diartikan, penegakan hukum sebagai kegiatan yang menarik lingkungannya ke dalam proses tersebut, dan yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Penegakan hukum bertukar aksi dengan lingkungannya, yang dapat disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya politik dan lain-lain. Sebetulnya tidak dapat ditentukan kapan penegak hukum mencapai titik akhirnya, karena proses tersebut berputar secara terus menerus (Satjipto Rahardjo, 2009: 11).

Problem-problem yang ada sekarang tidak dapat disamakan begitu saja dengan yang terjadi pada 100 tahun yang lalu. Dibanding dengan keadaan yang sekarang, apa yang terjadi pada waktu itu dapat difatikan sangat sederhana, dengan ruang lingkup yang sangat kecil. Peranan serta kehadiran organisasi memang kurang menonjol, karena segala sesuatunya dapat diatasi dengan tata kerja dan struktur yang sederhana. Mengenai hubungan antara struktur masyarakat dan penegakan hukum, akan dilihat bahwa penegakan hukum pada masyarakat dengan tingkatan perkembangan sosial yang masih sederhana, kehidupan hukumnya pun masih bersifat intim, lebih personal. Sifat tersebut jelas tidak dapat dilekatkan pada cara-cara penyelenggaraan hukum sekarang ini. Sekarang ini organisasi dijumpai hampir pada semua bidang kehidupan, seperti pendidikan, perdagangan, pemerintahan, militer, dan hukum. Problem-problem sudah menjadi makin besar, maka melibatkan sejumlah banyak orang, tugas-tugas harus dilaksanakan semakin menggunung, maka dibutuhkan suatu cara penanganan bersama. Kalau suatu kegiatan sudah melibatkan kompleksitas yang begitu tinggi dan jumlah orang begitu banyak, maka kita harus menjalankannya dalam konteks organisasi. Mewujudkan hukum sebagai ide-ide ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Kita tidak mengenal adanya Jawatan Hukum atau Kantor Hukum, melainkan: Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Permasalahan dan juga Badan Peraturan Perundang-undangan. Badan-badan yang tampak sebagai organisasi yang berdiri sendiri-sendiri tersebut pada hakekatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat. Tanpa dibuatnya organisasi-organisasi tersebut, hukum tidak dapat dijalankan dalam masyarakat. Apabila keadaannya sudah demikian, maka tentunya dalam rangka membicarakan penegakan hukum, tidak dapat dilewatkan pembicaraan mengenai segi organisasi tersebut. Tujuan-tujuan hukum yang abstrak di tengah suatu masyarakat yang kompleks hanya dapat diwujudkan melalui pengorganisasian yang kompleks pula. Mewujudkan tujuan hukum diperlukan berbagai organisasi, sekalipun pada hakekatnya bertugas untuk mengantarkan orang kepada tujuan-tujuan hukum, namun masing-masing tetap berdiri sendiri-sendiri sebagai badan yang bersifat otonom (Satjipto Rahardjo, 2009: 14).

Banyak kepentingan hukum dalam masyarakat yang dilindungi oleh UU, yang pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yakni:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*)
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*)
3. Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*)

Walaupun dapat dibedakan dalam 3 kelompok kepentingan hukum, namun adakalanya suatu kepentingan hukum dapat dimasukkan ke dalam lebih dari satu golongan kepentingan hukum tersebut (Adami Chazawi, 2002: 2).

Berdasarkan penjelesan-penjelasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan sementara bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (2012: 8) yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Hukum dipahami sebagai tatanan pemaksa, yakni sebagai tatanan yang menerapkan sanksi berupa tindakan paksa, maka ketentuan yang menjelaskan hukum dalam undang-undang akan tampak sebagai pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu, yang ditetapkan oleh tatanan hukum itu, tindakan paksa tertentu, yang ditetapkan oleh tatanan itu sendiri seharusnya dilakukan. Tindakan paksa adalah tindakan yang dilakukan bukan atas keinginan individu yang menjadi sasaran dan, bila terjadi perlawanan, akan digunakan perlawanan fisik (Hans Kelsen, 2011: 123).

Hukum sebagai tatanan pemaksa yang menerapkan sanksi berupa tindakan paksa salah satunya adalah penegakan hukum pada tindak pidana. Tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit* (Erdianto Effendi, 2011:96). Terjemahan *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia terjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya (Erdianto Effendi, 2011:97).

Menurut Moeljatno (1983: 22-23) menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Setiap tindakan atau perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana itu sendiri. Setiap unsur yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam 2 (dua) macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (Lamintang, 2013: 193).

Unsur-unsur yang termasuk dalam unsur subjektif tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogermerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan penipuan, pencurian, pemerasan, dan lain-lain:
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP; dan
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifatnya melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP; dan
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat (Lamintang, 2013:193-914).

Sumber utama hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari 3 Buku. Buku I berisi mengenai aturan umum hukum pidana, Buku II berisi mengenai tindak pidana kejahatan dan Buku III mengenai tindak pidana pelanggaran. *Memorie Van Toelichting* (MvT) menerangkan, pembedaan dan pengelompokan tindak pidana menjadi kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) didasarkan pada pemikiran bahwa: Kenyataannya dalam masyarakat ada sejumlah perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya sudah mengandung sifat terlarang (melawan hukum), yang karenanya pada pembuatnya patut dijatuhi pidana walaupun kadang-kadang perbuatan seperti itu tidak dinyatakan dalam UU. Perbuatan-perbuatan yang baru mempunyai sifat terlarang dan

kepada pembuatnya diancam dengan pidana setelah perbuatan itu dinyatakan dalam UU (Lamintang, 2014: 199-200).

Pemikiran yang demikian tergambar dari istilah *rechtdelicten* untuk kejahatan sebagaimana yang dimaksud pertama dan *wetsdelicten* untuk menyebut pelanggaran sebagaimana yang dimaksudkan kedua, yang pada kenyataannya kejahatan berupa tindak pidana yang lebih berat dari pelanggaran. Terang bahwa bagi kejahatan pada dasarnya sifat terlarangnya atau tercelanya perbuatan itu adalah terletak pada masyarakat, sedangkan bagi pelanggaran karena dimuatnya dalam UU (Adami Chazawi, 2002:1-2).

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu (Moeljatno, 2002:81) :

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kelapaaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus dan culpa.
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat dipidana (Pasal 54 KUHP). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP).
4. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
5. Pembarengan (*concurcus*) pada pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enyeng lebih mudah daripada pidana berat.

Tindak pidana yang akan dibahas adalah tindak pidana di bidang merek yang diatur dalam Pasal 94 UUM yaitu tindak pidana memperdagangkan barang dan/atau jasa hasil pelanggaran Pasal 90,91,92, atau 93. Pasal 94 merumuskan sebagai berikut:

- (1) *Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*
- (2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.*

Tindak pidana Pasal ini serupa dengan tindak pidana penadahan (*heling*) pada Pasal 480 KUHP. Meskipun demikian, kasus yang memenuhi unsur Pasal 94 tidak dapat diterapkan ketentuan penadahan karena tindak pidana pasal ini merupakan *lex specialist* dan bersifat khusus. Kekhususan itu terletak pada keadaan dan sifat objek serta lapangan hukum yang mengaturnya. Objek tindak pidana pasal 94 adalah benda-benda yang semula hak si pembuat sendiri. Timbul sifat hasil dari kejahatan karena diletakkannya merek atau tanda secara melawan hukum pada benda-benda tersebut. Jika merek atau tanda yang bersifat melawan hukum tidak dapat dilekatkan pada benda yang diperdagangkan maka tindak mungkin akan terjadi kejahatan Pasal 94 ini. Sifat melawan hukum dari Pasal 90,91,92, atau 93 yang menyebabkan timbulnya tindak pidana tersebut dan kejahatan Pasal 94 terletak pada merek atau tanda yang dipergunakan si pembuat telah terdaftar atas barang milik pihak lain, kecuali tanda indikasi asal yang tidak perlu didaftar.

Sifat melawan hukum memperdagangkan barang menurut Pasal 94 ini bukan terletak pada barang yang diperdagangkan tetapi terletak pada merek atau tanda yang dilekatkan secara melawan hukum pada barang yang diperdagangkan. Sifat hasil kejahatan pada benda yang dimaksud Pasal 94 tidak dapat lenyap selama merek atau tanda yang melawan hukum tadi melekat pada barang tersebut. Sifat hasil kejahatan tersebut baru akan lenyap apabila dilakukan suatu perbuatan hukum terhadap benda objeknya dengan itikad baik. Dengan lenyapnya sifat benda hasil kejahatan maka akan menjadi lenyap pula sifat melawan hukum jika terhadap benda tersebut dilakukan suatu perbuatan (Adami Chazawi, 2007: 162-163).

Jika rumusan Pasal 94 Ayat (1) tersebut dirinci maka terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur-unsur objektif
 - a. Perbuatan : memperdagangkan
 - b. Objek : barang atau jasa yang merupakan hasil pelanggaran Pasal 90,91,92 dan 93
2. Unsur subjektif
 - a. Kesalahan : yang diketahui atau patut diketahui barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran Pasal 90,91,92, dan 93

Memperdagangkan adalah perbuatan memperjualbelikan barang, dimana satu pihak yakni penjual menjual barang dan/atau jasa pada pihak lain yang disebut pembeli dengan membayar sejumlah uang sebagai harga barang tersebut pada si penjual. Perbuatan memperdagangkan terdapat perbuatan hukum jual beli (Adami Chazawi, 2007: 164). Unsur objek tindak pidana ada dua, yakni barang dan jasa. Pada objek ini melekat unsur keadaan yang menyerta, yakni hasil pelanggaran. Lengkapnya, objek tersebut merupakan benda hasil pelanggaran Pasal 90,91,92 dan 93. Tidak seperti tindak pidana Pasal 90,91,92 dan 93 yang selalu mencantumkan unsur melawan hukum dengan frasa “tanpa hak, walaupun tindak pidana Pasal 94 tidak dicantumkan unsur tanpa hak, namun di sini sesungguhnya ada unsur melawan hukum secara terselubung. Terdapat dan melekat pada sifat barang atau jasa sebagai hasil pelanggaran Pasal 90,91,92 dan 93. Tidak perlu dibuktikan secara khusus karena tidak dirumuskan. Unsur sifat barang hasil pelanggaran Pasal 90,91,92 dan 93 merupakan unsur objektif sekaligus dituju oleh unsur kesalahan sehingga harus dibuktikan keberadaannya. Orang yang memperjualbelikan barang berdasarkan Pasal 94 tidak mungkin dipidana apabila tidak dapat dibuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana Pasal 90,91,92 dan 93. Orang yang melanggar pasal-pasal tersebut tidak sama dengan orang yang memperjualbelikan barangnya (Pasal 94). Perkara tersebut diberkas secara terpisah karena sejak semula si pelanggar tidak dapat diperiksa dan perkaranya tidak dapat diberkas karena tidak diketahui keberadaannya. Meskipun salah satu di antara empat pasal ini tidak didakwakan pada terdakwa agar si pembuat dapat dipidana berdasarkan Pasal 94 maka tetap wajib dibuktikan terjadi tindak pidana Pasal 90,91,92 dan 93 (Adami Chazawi, 2007: 164-165).

Unsur kesalahan dalam tindak pidana Pasal 94 ada dua yakni bentuk kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan dirumuskan dengan kata “diketahui”, sedangkan kealpaan dirumuskan dengan frasa “patut diketahui”. Kesalahan dalam bentuk “diketahui” merupakan bagian dari kesengajaan. Kesengajaan dalam bentuk diketahui selalu diarahkan pada semua unsur yang disebutkan pada urutan setelah diketahui sama dengan sengaja pada bentuk yang dikehendaki. Bentuk “menghendaki” selalu diarahkan pada melakukan perbuatan, sedangkan sengaja bentuk diketahui selalu diarahkan pada unsur selain dan setelah perbuatan. Sama halnya dengan unsur kealpaan (*culpoos*), kesengajaan juga selalu diarahkan pada selain dan setelah perbuatan. Hubungan antara unsur diketahui dengan unsur-unsur lain yang disebutkan sesudahnya juga dijiwai olehnya. Diketahui atau patut diketahui ditujukan terhadap keadaan bahwa benda objek merupakan hasil pelanggaran Pasal 90,91,92 dan 93. Hubungan antara unsur diketahui ditujukan terhadap keadaan bahwa benda objek merupakan hasil pelanggaran Pasal 90,91,92 atau 93. Pengetahuan atau patut diketahui tersebut dapat dibuktikan, apabila secara objektif memang terbukti telah terjadi tindak pidana Pasal 90,91,92 atau 93. Kesalahan mengetahui dan patut mengetahui tidak mungkin dapat dibuktikan jika sebenarnya tidak terjadi tindak pidana Pasal 90,91,92 atau 93. Walaupun bentuk menghendaki tidak dicantumkan, namun tidak berarti bahwa si pembuat tidak menghendaki untuk mewujudkan perbuatan memperdagangkan. Perbuatan memperdagangkan bersifat aktif maka tidak mungkin pembuat perbuatan itu tidak dikehendaki. Kehendak (sengaja dalam arti sempit) untuk melakukan perbuatan memperdagangkan secara terselubung terdapat pada perbuatan memperdagangkan. Terbuktinya perbuatan itu maka dianggap terbukti juga unsur kesengajaan sebagai kehendak melakukan perbuatan tersebut (Adami Chazawi, 2007: 165-166).

Pasal 95 UUM berbunyi “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan” menggolongkan seluruh tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut sebagai delik aduan, bukan delik biasa. Terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana-tindak pidana seperti itu disebut *klacht delicten*, yaitu delik-delik yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan. Delik-delik yang hanya dapat dituntut apabila ada suatu pengaduan dari orang yang merasa dirugikan itu di dalam bahasa Belanda disebut *delicten allen op klacht vervolgbaar* atau di dalam bahasa Jerman disebut *antragsdelikte* yakni sebagai lawan dari apa yang disebut *delicten van ambtswege vervolgbaar* atau delik-delik yang dapat dituntut sesuai dengan jabatan. Menurut profesor-profesor Von Liszt, Berne dan Von Swideren bahwa dipandang secara objektif pada beberapa delik tertentu itu kerugian material dan ideal dari orang yang secara langsung telah dirugikan harus lebih diutamakan daripada kerugian-kerugian lain pada umumnya.

Menurut *Memorie Van Toelichting*, disyaratkannya suatu pengaduan pada beberapa delik tertentu itu adalah berdasarkan pertimbangan bahwa ikut campurnya penguasa di dalam suatu kasus tertentu itu mungkin akan mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan-kepentingan tertentu dari orang yang telah dirugikan dari pada kenyataan, yakni jika penguasa telah tidak ikut campur di dalam kasus tersebut. Keputusan apakah seseorang yang telah merugikan itu perlu dituntut atau tidak oleh

yang telah merasa dirugikan (Lamintang, 2013: 217-218).

Mengenai *klachtdelicten* tersebut dapat dibuat suatu perbedaan antara *absolute klachtdelicten* dengan yang disebut *relative klachtdelicten*. *Absolute klachtdelicten* atau delik aduan absolut adalah delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan "*voorwaarde van vervolgbaarheid*" atau merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut. *Relative klachtdelicten* atau delik aduan relatif adalah delik dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu *voorwaarde vor vervolgbaarheid* atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan bersifat khusus. *Klacht* atau pengaduan adalah suatu laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang-orang tertentu. Delik-delik aduan absolut itu adalah cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedang pada delik-delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orangnya yang ia duga telah merugikan dirinya (Lamintang, 2013: 218-219)

Disebutkannya nama seseorang sebagai orang yang telah merugikan seorang pengadu pada suatu delik aduan absolut itu memberikan kemungkinan kepada alat-alat negara untuk tidak saja melakukan penuntutan terhadap orang yang namanya telah disebutkan oleh pengadu, melainkan juga terhadap lain-lain peserta dari kejahatan walaupun nama-nama merek itu tidak disebutkan di dalam pengaduan. Orang juga sering mengatakan bahwa suatu pengaduan pada delik-delik aduan absolut itu adalah *onsplitsbaar* atau tidak dapat dipecahkan dan tidaklah demikian halnya dengan suatu pengaduan pada delik-delik aduan relatif yang *splitsbaar* atau dapat dipecahkan. Delik-delik aduan relatif itu alat-alat negara hanya dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang namanya telah disebutkan oleh pengadu sebagai orang yang telah merugikan dirinya. Apabila di dalam suatu delik aduan relatif itu terdapat lain-lain peserta, maka setiap peserta itu tidak dapat dituntut sifatnya dari kejahatannya, secara langsung menjadi korban atau secara langsung telah dirugikan (Lamintang, 2013: 219-220).

Menurut ketentuan undang-undang yakni seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP, jangka waktu untuk mengajukan pengaduan itu hanyalah dalam waktu enam bulan apabila orang yang berwenang untuk mengajukan pengaduan itu bertempat tinggal di Indonesia atau dalam waktu sembilan bulan apabila ia tinggal di luar Indonesia, yaitu terhitung dari saat ia mengetahui tentang benar atau tidaknya sesuatu tindakan yang telah merugikan dirinya itu dilakukan orang lain. Jangka waktu seperti dimaksud di atas itu telah ditentukan demikian rupa untuk memberikan kesempatan kepada orang yang merasa dirinya telah dirugikan oleh sesuatu tindakan yang telah dilakukan oleh orang lain, yakni untuk mempertimbangkan apakah ia akan mengajukan suatu pengaduan atau tidak (Lamintang, 2013: 220-221).

Menurut *Memorie Van Toelichting*, penentuan dari suatu jangka waktu seperti dimaksud di atas itu adalah untuk menentukan suatu *vervaltermijn* atau untuk menentukan suatu jangka waktu tertentu, yang apabila di dalam jangka waktu yang telah ditentukan itu orang yang berwenang untuk mengajukan suatu pengaduan telah tidak mengajukan suatu pengaduan, maka haknya untuk mengajukan pengaduan menjadi batal. Alasan-alasan lain telah dikemukakan di dalam *Memorie Van Toelichting* yaitu agar seseorang yang berwenang untuk mengajukan pengaduan itu jangan sampai terlalu lama memikul beban menurut undang-undang dan agar perkaranya dapat dituntut secepat mungkin. Apabila di atas telah dikatakan bahwa yang berwenang untuk mengajukan suatu pengaduan itu pada dasarnya adalah orang yang menurut sifat dari kejahatannya secara langsung telah menjadi korban atau telah dirugikan, maka undang-undang juga telah membuka kesempatan bagi orang lain selain orang yang menjadi korban ataupun orang yang telah dirugikan untuk mengajukan pengaduan (Lamintang, 2013: 221).

Semua tindak pidana di bidang merek merupakan tindak pidana aduan absolut. Tanpa adanya pengaduan, kasus tindak pidana merek tidak dapat dituntut ke pengadilan. Terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Kekhususan lain yakni mengenai diperkenalkannya pejabat penyidik tertentu di Dirjen HKI selain Polri untuk melakukan penyidikan perkara merek, sama halnya untuk tindak pidana paten dan hak ciptalainnya. Walaupun ada pejabat sipil tertentu selain kepolisian sebagai penyidik tindak pidana merek, sifatnya tidak absolut. Selama pejabat sipil tertentu tidak atau belum melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan, penyidik dari kepolisian tetap dapat melakukan penyusutan/penanganan (Adami Chazawi, 2007: 166). Penegakan hukum pada tindak pidana di bidang merek memerlukan adanya aduan dari pihak yang dirugikan yaitu pemegang hak atas merek. Masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya tindak pidana merek tersebut tidak dapat melaporkannya secara langsung kepada aparat penegak hukum. Pemegang hak atas merek tersebut yang berhak memberikan laporan kepada aparat penegak hukum karena tindak pidana di bidang merek merupakan delik aduan.

Penegakan hukum dalam kasus ini dapat diproses karena adanya aduan dari Benny Pontian Muslim selaku pemegang hak atas merek yang merasa dirugikan dengan adanya perbuatan terdakwa yang memperdagangkan barang yang merupakan hasil dari pelanggaran merek milik Benny Potiam Muslim yang sudah terdaftar di Ditjen HKI. Kemudian dalam amar Putusan Hakim, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yakni “memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90”. Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan Pasal 94 Ayat (1) yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur-unsur objektif

a. Perbuatan : *memperdagangkan*

Memperdagangkan adalah perbuatan memperjualbelikan barang, dimana satu pihak yakni penjual menjual barang dan/atau jasa pada pihak lain yang disebut pembeli dengan membayar sejumlah uang sebagai harga barang tersebut pada si penjual. Perbuatan memperdagangkan terdapat perbuatan hukum jual beli (Adami Chazawi, 2007: 164). Terdakwa membuka usaha Toko Duta ACC (Duta *Spare Part*) terletak di ITC Roxy Mas Lantai 3 Blok B No.72 Jakarta Pusat dan Toko Duta ACC (Duta *Spare Part*) milik Terdakwa tersebut bergerak dibidang penjualan barang dan/atau jasa yaitu *acesoris handphone* antara lain Sarung Handphone, Spiker Aktif *handphone* dan *memory card* yaitu merek HC dan merek V-GEN (V-GEN MEMORY). *memory card* yang dibeli oleh Terdakwa dari Anton dengan menggunakan merek V-GEN sama persis dengan *memory card* merek V-GEN produk saksi Benny Pontian Muslim alias Lim Beny Pontian Muslim, kemudian oleh terdakwa dijual lagi dan mendapat keuntungan, mutu dari *memory card* merek V-GEN yang dibeli Terdakwa dari Anton tersebut mutunya jauh dibawah *memory card* merek V-GEN produksi saksi Benny Pontian Muslim alias Lim Benny Pontian Muslim. Terdakwa telah mengerti bahwa *memory card* merek V-GEN dibeli dari Anton tersebut adalah bukan *memory card* merek V-GEN yang diproduksi oleh Benny Pontian Muslim alias Lim Benny Pontian Muslim, kemudian menjual kepada pihak lain, karenanya terbukti Terdakwa sengaja sebagai maksud memperdagangkan *memory card* merek V-GEN dari Anton tersebut.

b. Objek : *barang atau jasa yang merupakan hasil pelanggaran Pasal 90,91,92 dan 93*

Objeknya adalah barang bukti berupa 535 (lima ratus tiga puluh lima) pes *memory card/* kartu memori/*hardware* merek V-GEN yang diduga hasil pelanggaran/hasil pemakaian merek secara tanpa hak tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek V-GEN terdaftar nomor IDM 000043792 untuk barang sejenis telah memiliki Sertifikat Hak Merek terdaftar dengan ciri-ciri persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

- 1) *Memory card* merek V-GEN terdaftar dalam Daftar Merek memiliki ciri-ciri :
 - a) Hologram asli Nomor Seri tidak sama.
 - b) Pada hologram terdapat huruf abjad.
 - c) Kapasitas sesuai dengan yang tertera pada barang.
 - d) Harga *memory card* 2 GB per 1 (satu) pes seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
 - e) Harga *memory card* 4 GB per 1 (satu) pes seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- 2) *Memory card* merek V-GEN yang diperjualbelikan oleh Terdakwa memiliki ciri-ciri :
 - a) Hologram asli Nomor Seri sama.
 - b) Pada hologram tidak terdapat huruf abjad.
 - c) Kapasitas tidak sesuai dengan yang tertera pada barang.
 - d) Harga *memory card* 2 GB per 1 (satu) pes seharga Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).

2. Unsur subjektif

a. Kesalahan : *yang diketahui atau patut diketahui barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran Pasal 90,91,92, dan 93*

Unsur kesalahan dalam tindak pidana Pasal 94 ada dua yakni bentuk kesengajaan dan kealpaan. Sama halnya dengan unsur kealpaan (*culpoos*), kesengajaan juga selalu diarahkan

pada selain dan setelah perbuatan. Hubungan antara unsur diketahui dengan unsur-unsur lain yang disebutkan sesudahnya juga dijiwai olehnya. Artinya, diketahui atau patut diketahui ditujukan terhadap keadaan bahwa benda objek merupakan hasil pelanggaran Pasal 90,91,92 dan 93.. Kesengajaan dirumuskan dengan kata “diketahui”, sedangkan kealpaan dirumuskan dengan frasa “patut diketahui”. Kesalahan dalam bentuk “diketahui” merupakan bagian dari kesengajaan. Kesengajaan dalam bentuk diketahui selalu diarahkan pada semua unsur yang disebutkan pada urutan setelah diketahui sama dengan sengaja pada bentuk yang dikehendaki. Bentuk “menghendaki” selalu diarahkan pada melakukan perbuatan, sedangkan sengaja bentuk diketahui selalu diarahkan pada unsur selain dan setelah perbuatan. Terdakwa memenuhi unsur kesengajaan karena dia mengetahui dan bisa membedakan *memory card* merek V-GEN produk saksi Benny Pontian Muslim alias Lim Benny Pontian Muslim dengan *memory card* yang Terdakwa beli dari Anton *memory card* merek V-GEN Terdakwa telah mengerti bahwa *memory card* merek V-GEN dibeli dari Anton tersebut adalah bukan *memory card* merek V-GEN yang diproduksi oleh Benny Pontian Muslim alias Lim Benny Pontian Muslim, kemudian menjual kepada pihak lain, karenanya terbukti Terdakwa sengaja sebagai maksud memperdagangkan *memory card* merek V-GEN dari Anton tersebut.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa menggunakan dasar hukum Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berbunyi “Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan sudah tepat. Namun ada kesalahan yang fatal dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Padahal dalam Pasal 94 ayat (1), sanksi pidana yang diancam adalah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Menurut Moeljatno (2008:81) Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja. Sedangkan pada Pasal 94 ayat (2), perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Tindak pidana merek dapat ditanggulangi dengan adanya peran aktif dari masyarakat selaku konsumen yang mengetahui adanya tindak pidana merek untuk memberitahunya kepada pemegang hak atas merek yang merasa dirugikan dengan adanya tindak pidana merek tersebut untuk kemudian ditangani oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan merek memerlukan adanya sanksi yang lebih memberatkan terutama pidana denda sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemalsuan merek tersebut. Karena omzet penjualan dari barang dan/jasa yang dipalsukan itu lebih besar daripada pidana denda yang diancamkan. Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 terutama pengaturan mengenai ancaman sanksi pidana yang akan dikenakan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini.

D. Kesimpulan

Tindak pidana merek merupakan delik aduan absolut sehingga perlu adanya laporan masyarakat mengenai adanya tindak pidana pemalsuan merek kepada pemegang hak atas merek tersebut untuk kemudian melaporkannya kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Amar Putusan Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Adanya unsur kesalahan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun padahal tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran yang seharusnya dihukum dengan pidana kurungan. Penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan merek memerlukan adanya sanksi yang lebih memberatkan terutama pidana denda sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemalsuan merek tersebut. Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terutama pengaturan mengenai ancaman sanksi.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Malang: Bayu Media Publishing
- Asian Law Group Pty Ltd, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama
- Hans Kelsen, 2011, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusa Media
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Grup
- Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek*, Jakarta: Prenadamedia Grup
- Sajipto Rahadjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Titon Slamet Kurnia, 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIP's*. Bandung: PT. Alumni
- Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, 1997, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIPs)*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

F. Korespondensi

- Berthon Jonathan
Jalan Perjuangan Nomor 16, RT/RW 13/05, Kelurahan Kebonpala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur 13650
08988389349 – berthonjonathan@gmail.com
- Lushiana Primasari, S.H., M.H.
Perum Griya Paloma No.87 RT/RW 1/1, Jatimalang Joho, Mojolaban, Sukoharjo
08179488990 – lushiana_hukumuns@gmail.com